

## ABSTRAK

### HERI MUHARMAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat..

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum dalam penetapan direksi badan usaha milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah masing-masing. Proses ini melibatkan penetapan jumlah anggota Direksi, persyaratan keahlian dan integritas, serta mekanisme pengangkatan kembali atau pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat hukum atas tindakan penetapan direksi badan usaha milik daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dapat mengakibatkan tindakan hukum seperti pembatalan penetapan, tuntutan pidana, atau gugatan perdata terhadap badan usaha itu sendiri dan/atau pihak yang menetapkannya. Pertimbangan hakim dalam perkara penetapan direksi PDAM dalam Putusan PTUN Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBY dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan TUN yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan TUN

Disimpulkan bahwa Untuk Direksi yang akan berakhir masa jabatannya, mereka wajib menyampaikan laporan tugas akhir paling lambat tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. Konsekuensi tersebut timbul karena pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Konsekuensi Hukum, Pembatalan Penetapan: Jika penetapan direksi melanggar ketentuan hukum, penetapan tersebut dapat dibatalkan.. oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan TUN, terhadap Penguat dihukum untuk membayar biaya perkara

Kata Kunci : Penetapan, Direksi, Bertentangan

## **ABSTRACT**

### **HERI MUHARMAN**

State-Owned Enterprises (SOEs) are one of the economic actors in the national economy based on economic democracy and play a crucial role in the implementation of the national economy to achieve public welfare.

This research is descriptive in nature with a normative-juridical approach. "The normative-juridical approach emphasizes legal science with an emphasis on secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials." To supplement the data, relevant materials and a literature review were collected, followed by legal analysis.

Legal arrangements for appointing directors of regionally-owned enterprises in accordance with laws and regulations and the General Principles of Good Governance are carried out through a General Meeting of Shareholders (based on Government Regulation Number 54 of 2017 and the respective Regional Government Laws). This process involves determining the number of Board members, expertise and integrity requirements, and mechanisms for reappointment or dismissal in accordance with applicable regulations. The legal consequences of appointing directors of regionally-owned enterprises that do not comply with laws and regulations can result in legal action such as revocation of the appointment, criminal prosecution, or civil lawsuits against the business entity itself and/or the appointing party. The judge's considerations in the case of appointing directors of the Regional Drinking Water Company in PTUN Decision Number 118/G/2021/PTUN.SBY were guided by the evidentiary system in the State Administrative Court procedural law, which leads to limited independent evidence as stipulated in Articles 100 and 107 of the State Administrative Court Law.

It is concluded that for directors whose terms of office are ending, they must submit a final report no later than three months before the end of their term of office. This consequence arises because the violation may be considered an unlawful act that is detrimental to the company, shareholders, or third parties. Legal Consequences, Cancellation of Stipulation: If the appointment of directors violates legal provisions, the stipulation may be annulled. Because the Plaintiff's lawsuit was declared inadmissible, then, based on the provisions of Article 110 of the State Administrative Court Law, the Plaintiff is ordered to pay court costs.

Keywords: Stipulation, Directors, Conflicting